

FLYPAPER EFFECT TERHADAP DETERMINAN BELANJA DAERAH DAN DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2013-2018 (TWO STAGE LEAST SQUARE)

Sagita Utami¹, Deden Dinar Iskandar²

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

¹sagitautami@students.undip.ac.id, ²deden_dinar@live.undip.ac.id

Abstract

Fiscal decentralization and regional autonomy implemented in Indonesia aims to increase regional fiscal capacity. This study aims to analyze the Flypaper effect and to see the factors that influence regional expenditure and local own-source revenue in Indonesia. Data analysis of research used panel data from 34 provinces in Indonesia in 2013-2018. This study uses the Two Stage Least Square (TSLS) method in estimating the regression model. The results of this study indicate that the first equation (RE), local own source revenue, GDP per capita, population, and balancing fund are significant to regional expenditure. In the second equation (LOSR), the variables of GDP per capita, population, and local tax are significant to original local government revenue. Moreover, there is no flypaper effect phenomenon on regional expenditure.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Regional Expenditure, Flypaper effect, Two Stage Least Square (TSLS)

JEL Classification: H72, H71

PENDAHULUAN

Sejak akhir tahun 2019 yang lalu, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah genap berusia 19 tahun. Secara resmi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Era Reformasi dimulai sejak 1 Januari 2001. Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah diantaranya

¹ Corresponding author

naiknya pendapatan asli daerah, dana perimbangan, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto. Pemerintah Daerah secara mandiri berwenang untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi daerah untuk menunjang belanja daerah. Namun, pemerintah pusat juga memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka memperkecil *fiscal gap* melalui mekanisme fiskal transfers (penyaluran dana perimbangan) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Transfer dana ini juga memiliki tujuan lain yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah karena disini pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat (Puspitasari & Indrajaya, 2012) .

(Halim, 2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi yaitu dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat yang seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi lebih besar. Meningkatnya transfer pemerintah kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, menimbulkan spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Sehingga hal ini mengindikasikan terdapat kemungkinan adanya *Flypaper effect* terhadap belanja daerah. Istilah *Flypaper effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1997) yang terkenal dengan jargon “*Money Sticks Where It Hits*”. Menurut Maemunah (2016), *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Nurhayati & Wicaksono, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadewi & Rahman, 2019) dan (S. Handayani & Saifudin, 2018) menunjukkan hasil bahwa *Flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri (PAD) daripada dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Oates dalam (Halim, 2012) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *Flypaper effect*.

UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah tersebut. Rendahnya PAD akan meningkatkan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat menandakan terjadinya krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap pendapatan dalam membiayai belanja daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah periode 2013-2018 diseluruh Provinsi di Indonesia rata-rata memiliki presentase berada dibawah 50%.

Faktor penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak yang bekerja dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Miragustia Mayza, 2015). Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith

beranggapan bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Sehingga apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Namun ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus menanggapi bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya.

Eksplorasi penerimaan daerah untuk PAD salah satunya dapat dilihat dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Proporsi pajak daerah terhadap PAD di Indonesia dari tahun 2013-2018 secara keseluruhan berada di atas 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah karena merupakan sumber pendapatan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Kecuali pada Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru dimana sumber pendapatan asli daerah berasal dari pendapatan lain-lain yang sah.

Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi pula. Tingkat kemakmuran suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan per kapita. Angka pendapatan perkapita didapat dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB riil perkapita masing-masing provinsi di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2018 rata-rata meningkat tiap tahunnya. Apabila dilihat secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi PDRB perkapita di Indonesia, terdapat kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi.

Permasalahan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemberian alokasi transfer kepada daerah yang menjadikan daerah semakin bergantung pada penerimaan alokasi transfer dan ketidakmampuan daerah dalam menggali potensi PAD, sehingga berakibat pada perbedaan dalam penerimaan maupun pengeluaran antar daerah. Diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal seharusnya selaras dengan peningkatan PAD. Namun, berdasarkan data yang dijelaskan sebelumnya, menjelaskan bahwa banyak daerah yang masih bergantung dengan dana bantuan transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai "*Flypaper effect Terhadap Determinan Belanja Daerah dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2018 (Two Stage Least Square)*".

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (A. Handayani, 2009).

Federalisme fiskal adalah studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional maupun subnasional. Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya (Prasetya, 2013).

Flypaper effect

Flypaper effect berasal dari kata *flypaper* yang berarti kertas lalat. Istilah *money sticks where it hits* menjelaskan seperti lalat yang menempel pada kertas lalat dimana uang menempel pada tempatnya seperti yang dijelaskan oleh Okun dalam (Inman, 2008) bahwa hibah (dana transfer) dari pemerintah akan tetap berada di tangan pemerintah, dan pendapatan individu (pendapatan daerah) akan tetap menjadi pendapatan daerah (individu) tersebut. Menurut Maemunah, *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Nurhayati & Wicaksono, 2017).

Untuk mendeteksi terjadinya *Flypaper effect* pada Belanja Daerah, dilakukan dengan membandingkan efek DAU, DAK, dan DBH dengan efek PAD terhadap Belanja Daerah. Syarat terjadinya *Flypaper effect* adalah apabila efek (nilai koefisien) dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan. Maimunah (2006) dalam (Armawaddin, Rumbia, & Afiat, 2017).

Intergovernmental Transfer

Intergovernmental Transfer atau dana transfer merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Pada hakikatnya, Dana Perimbangan dapat ditujukan untuk menurunkan ketimpangan *fiscal vertical* (ketimpangan antar tingkat pemerintahan), maupun horizontal (ketimpangan antar pemerintahan daerah) (Bank, 2010). Pada dasarnya jenis-jenis transfer dapat dikelompokkan kedalam dua kategori besar, yaitu transfer tanpa syarat (*unconditional transfer, general purpose grant, block grant*) dan transfer dengan syarat (*conditional grant, categorical grant, specific purpose grant*) (Broadway & Shah, 2006).

Di Indonesia, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antaradaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu menadani kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat dikembangkan menjadi tiga golongan yaitu Model Pembangunan tentang Pengeluaran Pemerintah, Hukum Wagner, dan Teori Peacock dan Wiseman. (Guritno, 1994 dalam Santosa & Rahayu, 2005). Model Pembangunan Tentang Pengeluaran Pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Hukum Wagner menjelaskan mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Keuangan, 2017). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Badan Pusat Statistik, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dilihat dari besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sukirno, 2016). Secara umum, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita riil penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Terdapat beberapa pemikiran atau teori mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, seperti teori pertumbuhan klasik, teori Schumpeter, Teori Harrod-Domar, dan Teori Pertumbuhan Neo-Klasik (Sukirno, 2016). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka perekonomian akan semakin baik. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik dikembangkan oleh Abramovits dan Solow. Dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

METODE PENELITIAN

Terdapat dua tipe variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel bebas (independen) sedangkan variabel independen dijelaskan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian, untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, dan Dana Perimbangan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari BPS 34 Provinsi di Indonesia dan DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan data panel yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dari periode 2013 hingga 2018 dan data silang (*cross-section*) yang meliputi 34 provinsi di Indonesia. Seluruh variabel dalam penelitian ini menggunakan logaritma natural untuk menyamakan satuan variabel dalam bentuk persen yang merupakan syarat penyelesaian persamaan regresi. Berikut spesifik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1 Jenis dan Sumber Data

Data	Keterangan	Satuan	Sumber Data
Belanja Daerah	Jumlah belanja daerah per 34 provinsi di Indonesia	Rupiah	DJPK Kementerian Keuangan
PAD	Pendapatan Asli Daerah per 34 provinsi di Indonesia	Rupiah	DJPK Kementerian Keuangan
PDRB Per Kapita	PDRB dibagi jumlah penduduk atas dasar harga konstan	Rupiah	Badan Pusat Statistika
jumlah penduduk	Jumlah penduduk per 34 provinsi di Indonesia	Orang/ jiwa	Badan Pusat Statistika
Pajak Daerah	Jumlah pajak daerah per 34 provinsi di Indonesia	Rupiah	DJPK Kementerian Keuangan

Sumber: BPS dan DJPK kemenkeu, diolah 2020

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Two Stage Least Square* serta menggunakan alat pengolahan data berupa aplikasi *evIEWS10*. Metode *Two Stage Least Square* (TSLS) adalah salah satu metode regresi yang termasuk ke dalam kelompok analisis persamaan struktural. TSLS digunakan pada penelitian ini karena dalam pendahuluan, salah satu sumber pembiayaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah sendiri juga dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga, penelitian ini menggunakan TSLS dimana dalam TSLS terdapat variabel independen yang diestimasi dengan persamaan tersendiri.

Bentuk persamaan struktural dalam penelitian ini secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LnBD}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LnPAD}_{it} + \alpha_2 \text{LnPDRBPK}_{it} + \alpha_3 \text{LnJmlP}_{it} + \alpha_4 \text{LnDaper}_{it} + e_{it} \dots (1)$$

$$\text{LnPAD}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPDRBPK}_{it} + \beta_2 \text{LnJmlP}_{it} + \beta_3 \text{LnPJD}_{it} + u_{it} \dots (2)$$

Keterangan:

- BD = Belanja Daerah (rupiah)
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (rupiah)
- PDRBPK = Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Harga Konstan (rupiah)
- JMLP = Jumlah Penduduk (jiwa)
- Daper = Dana Perimbangan (rupiah)
- α_0, β_0 = *Intercept*
- α, β = Nilai Koefisien Variabel
- i* = 1,2,3,...,34 (data *crosssection* 34 Provinsi)
- t* = 1,2,3,4,5,6 (data *time series*, tahun 2013-2018)
- e_{it}, u_{it} = *error term*

Seluruh variabel diberikan perlakuan dengan transformasi logaritma natural untuk menyamakan satuan dalam penelitian dimana terdapat satuan dalam bentuk rupiah dan jiwa. Dalam menganalisis kedua model dalam persamaan diatas, metode

yang digunakan adalah persamaan simultan karena terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel endogen secara simultan. Sehingga, regresi tunggal dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) bias untuk digunakan

Identifikasi merupakan suatu cara untuk mencari suatu penyelesaian yang tunggal sebagai parameter structural dari bentuk sederhana dalam suatu model. Identifikasi model persamaan simultan dilakukan untuk menentukan metode yang sesuai untuk mengestimasi model tersebut (Purnamasari, 2015). Uji identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan tidak atau kurang teridentifikasi (*underidentified*), tepat teridentifikasi (*exactly identified*), dan terlalu teridentifikasi (*over identified*) (Gujarati, 2013).

Jika $K-k = m-1$, maka persamaan tepat teridentifikasi (*exactly identified*), sedangkan jika $K-k < m-1$ maka persamaan terlalu teridentifikasi (*over identified*). Berdasarkan hasil identifikasi model untuk persamaan belanja daerah didapatkan nilai $K-k$ adalah 1 (6-5) dan $m-1$ adalah 1 (2-1) sehingga $1 = 1$ (*exactly identified*) dan pada persamaan pendapatan asli daerah nilai $K-k$ adalah 2 (6-4) dan $m-1$ adalah 1 (2-1) sehingga $2 > 1$ (*over identified*) Berdasarkan hasil uji identifikasi diatas, menjelaskan bahwa hasil kedua uji identifikasi tersebut *over identified* dan *exactly identified* sehingga penelitian ini akan menggunakan metode *Two Stage Least Square* (TSLS), metode TSLS ini akan menghasilkan estimator yang konsisten dan efisien. *Two Stage Least Square* (TSLS) adalah salah satu metode regresi yang termasuk ke dalam kelompok analisis persamaan struktural. Metode ini merupakan perluasan dari metode OLS yang biasa digunakan dalam perhitungan analisis regresi.

Sebelum melakukan estimasi model persamaan simultan, perlu dilakukan uji simultanitas terlebih dahulu. Uji Simultan Hausman digunakan untuk membuktikan terjadi masalah simultan antar persamaan struktural. Pada dasarnya, uji apakah variabel independen berkorelasi dengan *error term* (Gujarati & Porter, 2013). Ketika antar persamaan struktural memiliki hubungan simultanitas, metode analisa yang digunakan yaitu *Two Stage Least Square* (TSLS) sehingga menghasilkan estimator yang konsisten dan efisien. Uji simultanitas Hausman dapat dilakukan dengan meregresikan nilai residual antar persamaan kemudian melihat perbandingan nilai *probability* variabel dengan nilai signifikansi = 5%, dengan syarat Jika nilai *probability* < 0,05 maka H_0 tidak dapat diterima, yang berarti terdapat masalah simultanitas dan Jika nilai *probability* > 0,05 maka H_0 diterima, yang berarti tidak terdapat masalah simultanitas (Widarjono, 2016).

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE*). Kondisi ini akan terjadi jika data yang digunakan terbebas dari adanya penyakit-penyakit seperti: autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Adapun terdapat 4 cara untuk menguji penyimpangan asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu: Deteksi Normalitas merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah variabel *error* berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji parsial dan simultan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Deteksi distribusi normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode grafik dan *Jarque-Bera test* (Gujarati, 2013).

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah antara variabel independen saling berkorelasi kuat atau tidak. Konsekuensi multikolinearitas adalah

invalidnya signifikansi variabel maupun besaran koefisien variabel dan konstanta. Multikolinearitas diduga terjadi apabila estimasi menghasilkan nilai R kuadrat yang tinggi (lebih dari 0,9), nilai F tinggi, dan nilai t-statistik semua atau hampir semua variabel penjelas tidak signifikan (Ghozali & Ratmono, 2013). Pengujian Multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan *correlation* matriks. Apabila nilai koefisien korelasi yang terjadi antara variabel independen yang berbeda tidak melebihi nilai *rule of thumb* (0,9) maka dikatakan model regresi yang diteliti tidak terdeteksi masalah multikolinearitas.

Deteksi Heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat apakah varian dari variabel *error homogeny* ataukah heterogen. Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan *uji Glejser*. Jika nilai *probability* lebih besar dari α 5 persen (0,05) maka tidak terdapat heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya, jika terdapat *probability* lebih kecil dari α 5 persen (0,05) maka terdapat heteroskedastisitas.

Autokorelasi merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah variabel error di periode sekarang berkorelasi atau tidak dengan periode sebelumnya (Nurhayati & Wicaksono, 2017). Autokorelasi merupakan suatu gejala dimana terdapat korelasi antara serangkaian observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (*time-series*) atau tempat seperti pada data *cross-section* (Gujarati & Porter, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dengan Durbin Watson. Autokorelasi dapat di deteksi dengan melakukan perbandingan nilai d dengan dL (batas bawah) dan dU (batas atas) pada statistik Durbin Watson.

Metode *Newey-West* merupakan perluasan dari *standard error* heteroskedastisitas-konsisten White yang digunakan untuk memperbaiki *standard error* OLS. *Standard error* yang telah dikoreksi juga disebut sebagai *standard error* HAC (*Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent*) atau cukup disebut sebagai *standard error* *Newey-West*. Dalam sample yang cukup besar, metode *Newey-West* dapat mengoreksi *standard error* OLS dalam situasi autokorelasi dan heteroskedastisitas (Gujarati, 2013).

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengukur hasil estimasi pada suatu model guna menjelaskan hasil tersebut. Adapun yang termasuk dalam pengujian hipotesis yaitu koefisien determinasi (R^2), uji koefisien secara individual (uji-t), serta uji koefisien secara keseluruhan (uji F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi sistem persamaan struktural belanja daerah dan pendapatan asli daerah dengan metode TSLS (*Two Stage Least Square*). Data diolah menggunakan program E-Views10. Data tersebut terdiri dari 204 observasi.

Tabel 2 Hasil Regresi Persamaan Belanja Daerah Metode *Two Stage Least Square*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-19.14892	4.583960	-4.177375	0.0000
LNPAD	0.296816	0.015723	18.87723	0.0000

LNPDRBPK	1.410832	0.166307	8.483300	0.0000
LNJMLP	0.985969	0.426288	2.312918	0.0220
LNDAPER	0.051583	0.002787	18.50643	0.0000
<i>Adjusted R-squared</i>	0.989533			
<i>F-statistic</i>	519.6904			

Sumber: Data sekunder, diolah 2020

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan *fixed effect* TSLS yang ditunjukkan pada tabel 2 maka model persamaan Belanja Daerah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\text{LnBD}_{it} = -19.14892 + 0.296816 \text{LnPAD}_{it} + 1.410832 \text{LnPDRBPK}_{it} + 0.985969 \text{LnJMLP}_{it} + 0.051583 \text{LnDAPER}_{it}$$

Diperoleh nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,989533. Hal ini berarti bahwa 98,95 persen belanja daerah di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Dana Perimbangan, sedangkan sisanya 1,05 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai F-statistik pada penelitian ini sebesar 519,6904. Sehingga F statistik > F-tabel (519,6904 > 2,65) hal ini berarti variabel independen (PAD, PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Dana Perimbangan) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Belanja Daerah) secara signifikan.

Hasil uji t-statistik dengan nilai t tabel sebesar 1,65263, Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena t hitung sebesar 18,87723 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena t hitung sebesar 8.483300 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena t hitung sebesar 2.312918 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05. Variabel Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah karena t hitung sebesar 18.50643 (t hitung > t tabel) dan angka signifikansi dibawah 0,05.

Tabel 3 Hasil Regresi Persamaan Pendapatan Asli Daerah

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.
C	-24.67082	-3.864582	0.0002
LNPDRBPK	1.085620	4.839250	0.0000
LNJMLP	1.891341	2.940907	0.0037
LNPJD	0.177538	12.89214	0.0000
<i>Adjusted R-squared</i>	0.989446		
<i>F-statistic</i>	529.6603		

Sumber: Data sekunder, diolah 2020

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* dengan *fixed effect model* yang ditunjukkan pada tabel 3 maka model persamaan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\text{LnPAD} = -24.67082 + 1.085620 \text{LnPDRBPK} + 1.891341 \text{LnJMLP} + 0.177538 \text{LnPJD}$$

Diperoleh nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,989446. Hal ini berarti bahwa 98,9 persen pendapatan asli daerah di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan pajak daerah, sedangkan sisanya 1,1 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai F-statistik pada penelitian ini sebesar 529,6603. Sehingga $F \text{ statistik} > F\text{-tabel}$ ($529,6603 > (2,26)$) hal ini berarti variabel independen (PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Pajak Daerah) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) secara signifikan.

Hasil uji statistik dengan nilai t tabel sebesar 1,65263 diperoleh bahwa Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena t hitung sebesar 4,839250 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$) dan angka signifikansi dibawah 0,05. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena t hitung sebesar 2,940907 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$) dan angka signifikansi dibawah 0,05. Variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena t hitung sebesar 12,89214 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$) dan angka signifikansi dibawah 0,05.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0.0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.296816. Nilai koefisien 0.296816 dengan menganggap variabel lain konstan, apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0.296816 persen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Sasana, 2010) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 130 Daerah dengan koefisien PAD 0,75 Hal ini berarti setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah 1 juta rupiah akan akan meningkatkan Belanja Daerah di Indonesia sebesar 0,75 juta rupiah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Wati & Fajar, 2017) menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Hal tersebut berarti Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Belanja Daerah di Indonesia.

Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis estimasi, variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0.0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 1,410832. nilai koefisien 1,410832 dengan menganggap variabel lain konstan, apabila PDRB Per Kapita meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,410832 persen. Hasil ini sesuai dengan Hukum Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, peningkatan pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Sukartini & Saleh, 2012) bahwa pada level pemerintah provinsi, pengujian hukum Wagner untuk kasus pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terbukti. Kedua jenis pengeluaran ini

secara signifikan dipengaruhi oleh variasi dalam PDRB per kapita dalam penelitian mengenai Pengujian Hukum Wagner pada level provinsi di Indonesia periode 2000-2009. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Mutiary, 2017) menunjukkan Pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan koefisien pendapatan per kapita 0,24 Hal ini berarti setiap kenaikan Pendapatan Per Kapita 1 rupiah akan akan meningkatkan Belanja Daerah di Indonesia sebesar 0,24 rupiah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0,0220 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,985969. nilai koefisien 0,985969 dengan menganggap variabel lain konstan, apabila jumlah penduduk meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,985969 persen.

Semakin besar dan meningkat jumlah penduduk di suatu daerah maka semakin diperlukannya adanya peningkatan sarana dan prasana umum baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga, perkembangan penduduk yang semakin besar memerlukan anggaran yang semakin besar. Hasil regresi diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2011) yang mengemukakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada periode 2004-2008 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,051583. nilai koefisien 0,051583 dengan menganggap variabel lain konstan, dana perimbangan meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,051583 persen.

Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Semakin besara dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang akan dikeluarkan (Halim, 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Armawaddin, 2018) tentang *Flypaper effect* dengan menggunakan model SEM dan PLS dengan hasil Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil regresi diatas sejalan dengan (Aminus, 2018) dan (Wati & Fajar, 2017) bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Ogan Ilir periode 2012- 2016 dan Kota Bandung pada periode 2004-2015.

Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien 1,002683. Nilai koefisien 1,002683 dengan menganggap variabel lain konstan, PDRB Per Kapita

meningkat sebesar 1 persen, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1,002683 persen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Wulandari & Ayuningsasi, 2014) menunjukkan Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien 0,875. Hal ini berarti setiap kenaikan Pendapatan Per Kapita 1 persen, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,875 persen.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0.0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 1.668643. Nilai koefisien 1.668643 dengan menganggap variabel lain konstan, Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1 persen, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1.668643 persen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Gitaningtyas & Kurrohman, 2014) menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sesuai dengan teori dari Simanjuntak (Halim, 2001) yang menyatakan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Santosa & Rahayu, 2005) menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut berarti Jumlah Penduduk akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah seluruh provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0.0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,252741. Nilai koefisien 0,252741 dengan menganggap variabel lain konstan, Pajak Daerah meningkat sebesar 1 persen, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,252741 persen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Usman, 2017) menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien 0,946. Hal ini berarti setiap kenaikan Pajak Daerah 1 persen akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 0,946 persen. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Natoen, Dewata, Sari, Ardiani, & Leonasari, 2018) menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut berarti Pajak Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Identifikasi *Flypaper effect* di Indonesia

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien dari PAD terhadap belanja daerah sebesar 0,296816 lebih besar daripada koefisien Dana Perimbangan sebesar 0,051583 terhadap Belanja Daerah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh PAD lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Dana Perimbangan. Hal ini berarti tidak ditemukan *Flypaper effect* dalam penelitian ini.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2010) dan (Nurhayati & Wicaksono, 2017) dimana terdapat *Flypaper effect* terhadap belanja daerah pada Provinsi di Indonesia pada periode 2005-2008 dan terdapat *Flypaper effect* pada realisasi APBD di seluruh Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2016. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hafiluddin, 2013) dimana tidak terdapat *Flypaper effect* pada 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2004 hingga 2012.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai determinan pendapatan asli daerah dan *Flypaper effect* terhadap belanja daerah di Indonesia periode 2013-2018 dengan menggunakan regresi data panel dapat disimpulkan, yaitu tidak terdapat fenomena *Flypaper effect* terhadap Belanja Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan, mengindikasikan bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia, lebih banyak provinsi dengan respon belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi lebih dipengaruhi oleh efek PAD daripada Dana Perimbangan.

Temuan empiris pada Belanja Daerah menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Seluruh Provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian pada Pendapatan Asli Daerah juga sesuai dengan hipotesis penelitian. Variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan saran diantaranya, perlu adanya dorongan terhadap Pemerintah Daerah untuk terus menumbuhkan potensi PAD serta Alokasi Belanja Daerah secara rasional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil daerah sehingga pemerataan kemampuan fiskal seluruh daerah dapat terpenuhi. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk mempertimbangkan pengelompokan daerah berdasarkan kemampuan fiskalnya, sehingga dapat diketahui secara pasti kondisi riil pengelolaan keuangan pada seluruh Provinsi di Indonesia.

REFERENSI

- Aminus, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. *Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, 9. <https://doi.org/10.34209/Equ.V22i2.936>
- Armawaddin, M. (2018). *Flypaper effect* Using SEM And PLS Models. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(2), 192–201. <https://doi.org/10.17977/Um002v10i22018p192>
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis *Flypaper effect* Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan*

- Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91.
<https://doi.org/10.21002/Jepi.V18i1.773>
- Bank, W. (2010). *Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat Ke Daerah*. 4–76.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-055294-1.00109-4>
- Broadway, R., & Shah, A. (2006). Intergovernmental Fiscal Transfers. In *Intergovernmental Fiscal Transfers*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6492-5>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eviews 8*. Semarang: BP UNDIP.
- Gitaningtyas, K. Y., & Kurrohman, T. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Ilmiah Mahasiswa 2014.*, 1–7.
- Gujarati, D. N Dan Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Terjemahan)* (Buku 2. 5t). Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & Porter, Dawn C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika*.
- Hafiluddin, N. (2013). *Analisis Flypaper effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. 1207–1223.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, A. (2009). *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah Dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Handayani, S., & Saifudin. (2018). *Flypaper effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015-2016 Sri Handayani Saifudin Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM) Diterima : April 2018 . Disetujui : Juli 2018 . 16(4), 79–106*.
- Inman, R. P. (2008). *The Flypaper effect Municipalities*. (February 1995).
- Keuangan, D. J. P. (2017). *Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2019). *Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2(2), 65. <https://doi.org/10.32662/Gaj.V2i2.615>
- Miragustia Mayza, R. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah, 3(1), 9–16.
- Mutiary, L. (2017). *Flypaper effect: An Empirical Study Of Indonesia Case (2004 – 2010)*. *Info Artha*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.31092/Jia.V1i1.19>
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. 7–15.
- Nurhayati, & Wicaksono, A. (2017). *Analisis Flypaper effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun*. 25(1), 65–74.
- Prasetya, F. (2013). *Modul Ekonomi Publik Bagian VII: Teori Fiskal Federalisme*. J,

- 53(9), 1689–1699.
- Purnamasari, D. (2015). Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Penjelasan Empiris Baru Skripsi. Retrieved From [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/45748/1/12_Purnamasari.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/45748/1/12_Purnamasari.Pdf)
- Puspitasari, R., & Indrajaya, I Gusti Bagus. (2012). *Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung*. 452–459.
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*.
- Sasana, H. (2010). *Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Indonesia*.
- Sasana, H. (2011). *Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal*.
- Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2012). Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi. *Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 19(1), 1–24.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). *JAF- Journal Of Accounting And Finance*, 1(01), 87–104. <https://doi.org/10.25124/jaf.v1i01.902>
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Equity*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.34209/Equ.V21i1.628>
- Widarjono, A. (2016). *Pengantar Ekonometrika Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Vol. 4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, P. P., & Ayuningsasi, A. A. K. (2014). *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. 530–539.